



Profil Data Pendidikan Berbasis Gender Kabupaten Bengkulu Tengah

Analisis Sinkronisasi Target RPJMD 2021-2026 dan Realitas Statistik

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai profil data pendidikan berbasis gender di Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan membandingkan target strategis yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dengan realitas statistik yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesetaraan gender dalam akses, partisipasi, kualitas sumber daya manusia, dan hasil akhir pendidikan, serta mengidentifikasi kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan implementasi di lapangan.

Temuan utama menunjukkan adanya kemajuan dalam mencapai paritas gender pada tingkat partisipasi pendidikan dasar, di mana Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan keseimbangan antara siswa laki-laki dan perempuan. Namun, analisis lebih lanjut mengidentifikasi beberapa tantangan krusial. Pertama, terdapat diskoneksi fundamental dalam kerangka perencanaan daerah. RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), namun pada saat yang sama, indikator kinerja utama (IKU) untuk program-program pendidikan inti—seperti tingkat partisipasi dan kualifikasi guru—tidak disajikan secara terpilah gender. Ketiadaan target yang spesifik gender ini menciptakan "titik buta kebijakan" (policy blind spot), yang berisiko mengaburkan disparitas yang mungkin masih ada dan menghambat perancangan intervensi yang tepat sasaran.

Kedua, laporan ini menyoroti adanya "langit-langit kaca" (glass ceiling) internal dalam struktur kepemimpinan di sektor pendidikan. Meskipun profesi guru didominasi oleh perempuan, representasi mereka pada posisi kepala sekolah secara signifikan lebih rendah. Fenomena ini menunjukkan adanya hambatan sistemik terhadap kemajuan karir perempuan pendidik, yang ironisnya terjadi di dalam institusi yang bertanggung jawab untuk mempromosikan kesetaraan. Ketiga, dimensi pendidikan diakui sebagai penghambat utama dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten, yang ditandai oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang masih rendah. Keterbatasan capaian pendidikan ini, khususnya bagi perempuan, menciptakan siklus kemiskinan dan keterbatasan pemberdayaan antargenerasi.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, laporan ini merekomendasikan serangkaian intervensi strategis. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), direkomendasikan untuk merevisi dokumen perencanaan agar seluruh target pendidikan diwajibkan terpilah gender. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, rekomendasinya mencakup pengembangan program penanganan putus sekolah yang responsif gender, implementasi kebijakan jalur karir yang transparan untuk mendorong kepemimpinan perempuan, serta penguatan sistem data pendidikan. Kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menjadi kunci untuk mengatasi norma sosial budaya yang menghambat kemajuan pendidikan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender secara sistematis ke dalam siklus perencanaan, implementasi, dan evaluasi, Kabupaten Bengkayang dapat mengakselerasi pencapaian visi pembangunannya secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Bagian 1: Mandat Strategis dan Kerangka Kebijakan Pendidikan Responsif Gender di Kabupaten Bengkayang

Pendahuluan

Pembangunan sektor pendidikan merupakan pilar fundamental dalam upaya mencapai kemajuan suatu daerah. Di Kabupaten Bengkayang, arah dan prioritas pembangunan, termasuk di bidang pendidikan, secara formal dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2021-2026. Dokumen ini berfungsi sebagai cetak biru strategis yang memandu alokasi sumber daya dan implementasi program oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memegang peranan sentral sebagai pelaksana utama kebijakan pendidikan. Analisis pada bagian ini bertujuan untuk membedah kerangka kebijakan tersebut dari perspektif gender, dengan menjawab pertanyaan mendasar: sejauh mana RPJMD 2021-2026 telah dirancang sebagai dokumen yang responsif gender, khususnya dalam konteks program dan target di sektor pendidikan?

Sub-bagian 1.1: Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Daerah

Kerangka pembangunan Kabupaten Bengkayang dilandasi oleh visi yang komprehensif: **"KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA"**. Visi ini, meskipun bersifat universal dan tidak secara eksplisit menyebutkan gender, secara inheren mensyaratkan partisipasi dan kontribusi setara dari seluruh komponen masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Pencapaian kemandirian, kesejahteraan, dan daya saing tidak akan optimal jika separuh dari populasi tertinggal dalam akses terhadap peluang pembangunan, terutama pendidikan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah menetapkan beberapa misi, di mana Misi Pertama menjadi jangkar utama bagi sektor pendidikan: **"Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius"**. Misi ini secara langsung

menempatkan pengembangan kapasitas manusia sebagai prioritas utama. Namun, istilah "kualitas sumber daya manusia" yang holistik hanya dapat tercapai apabila setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya secara penuh. Oleh karena itu, upaya mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas harus diiringi dengan komitmen untuk menutup kesenjangan gender yang mungkin ada dalam sistem pendidikan.

Misi ini kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan strategis yang lebih operasional, yaitu "Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat". Dari tujuan ini, diturunkan dua sasaran strategis yang menjadi fokus utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:

1. Meningkatnya angka melek huruf.
2. Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun.

Kedua sasaran ini merupakan indikator fundamental capaian pendidikan suatu populasi. Namun, nilai agregat dari kedua indikator ini dapat menyembunyikan disparitas signifikan antara laki-laki dan perempuan. Analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa kemajuan dalam angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dirasakan secara merata oleh kedua gender.

Sub-bagian 1.2: Dekonstruksi Program Pendidikan dalam RPJMD

RPJMD 2021-2026 menjabarkan serangkaian program dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran strategis di bidang pendidikan. Analisis kritis terhadap program-program ini, beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menyertainya, mengungkapkan sebuah pola yang signifikan. Berikut adalah beberapa program dan target utama yang relevan :

- **Program Pengelolaan Pendidikan:**
 - **Tingkat Partisipasi PAUD:** Target capaian pada tahun 2026 adalah 100%, meningkat dari kondisi awal 78,65% pada tahun 2020.
 - **Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun (Pendidikan Dasar):** Target capaian pada tahun 2026 adalah 99,80%, dari kondisi awal 93,67%.
 - **Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun (Pendidikan Menengah Pertama):** Target capaian pada tahun 2026 adalah 99,17%, dari kondisi awal 93,17%.
- **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan:**
 - **Rasio Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV:** Target capaian pada tahun 2026 adalah 95,39%, dari kondisi awal 86,66%.

Sebuah observasi penting dari dekonstruksi program ini adalah bahwa tidak ada satu pun dari target-target inti pendidikan tersebut yang secara eksplisit dipilah (disaggregated) berdasarkan gender. Seluruh indikator disajikan dalam bentuk angka agregat yang merepresentasikan total populasi sasaran. Hal ini menciptakan sebuah "titik buta kebijakan" yang serius.

Di satu sisi, dokumen RPJMD yang sama memuat program spesifik bernama "Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan", yang memiliki target untuk

meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dari 71,96 pada tahun 2020 menjadi 75,00 pada tahun 2026. IPG merupakan indeks komposit yang salah satu komponen utamanya adalah capaian pendidikan perempuan. Dengan demikian, muncul sebuah diskoneksi struktural dalam dokumen perencanaan: pemerintah daerah menargetkan peningkatan sebuah indeks yang spesifik gender (IPG), namun pada saat yang sama menggunakan indikator yang buta gender (gender-blind) untuk mengukur kemajuan di salah satu sektor paling fundamental yang membentuk indeks tersebut, yaitu pendidikan.

Pendekatan perencanaan yang terkotak-kotak (siloes) ini memiliki implikasi yang signifikan. Tanpa adanya target partisipasi atau kualifikasi guru yang terpilah gender, sangat mungkin bagi pemerintah daerah untuk secara teknis mencapai target agregat 99,80% partisipasi usia 7-12 tahun, sementara di balik angka tersebut tersembunyi masalah disparitas. Sebagai contoh, angka tersebut bisa saja menutupi kondisi di mana partisipasi anak laki-laki di satu kecamatan lebih rendah karena tekanan ekonomi untuk bekerja, sementara partisipasi anak perempuan di kecamatan lain terhambat oleh pernikahan usia dini. Ketiadaan data terpilah dalam dokumen perencanaan strategis tertinggi menghalangi identifikasi masalah secara presisi dan, akibatnya, menghambat perumusan intervensi kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

Sub-bagian 1.3: Program Lintas Sektor: Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak

Komitmen pemerintah daerah terhadap kesetaraan gender secara lebih luas tercermin dalam program-program lintas sektor yang juga termuat dalam RPJMD. Selain target peningkatan IPG, terdapat pula target untuk meningkatkan "Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah" dari 51,90% menjadi 55,00% dan di lembaga swasta dari 63,29% menjadi 65,00% pada tahun 2026. Program-program ini menunjukkan adanya kesadaran politik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam ranah publik.

Namun, ketika komitmen ini dikontekstualisasikan dengan kondisi riil sektor pendidikan, sebuah paradoks kebijakan muncul. Dokumen RPJMD secara jujur mengakui bahwa lambatnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bengkayang terutama disebabkan oleh lemahnya dimensi pendidikan. Secara spesifik, disebutkan bahwa capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 6,76 tahun masih belum menggembirakan dan jauh di bawah rata-rata provinsi (7,37 tahun). Angka 6,76 tahun ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk dewasa di Bengkayang bahkan belum menyelesaikan pendidikan setingkat SMP.

Di sinilah letak paradoksnya: pemerintah daerah berambisi untuk meningkatkan pemberdayaan gender (diukur dengan IPG dan partisipasi perempuan di ranah publik) sementara pilar fundamental dari pemberdayaan itu sendiri—yaitu pendidikan dasar yang tuntas bagi seluruh populasi—diakui masih sangat lemah. Upaya mendorong pemberdayaan gender tidak dapat dipisahkan dari upaya penguatan sistem pendidikan secara universal. Adalah sebuah tantangan besar untuk meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah jika fondasi pendidikan dasar bagi populasi perempuan (dan juga laki-laki) secara umum masih rapuh.

Hal ini mengindikasikan adanya potensi ketegangan dalam prioritas kebijakan. Fokus pada metrik pemberdayaan yang bersifat "hulu" atau top-down, seperti kuota di lembaga pemerintah, berisiko menjadi tidak efektif jika tidak diimbangi dengan investasi masif pada isu "hilir" atau fundamental, yaitu memastikan setiap anak, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan setidaknya pendidikan dasar 9 tahun. Peningkatan RLS bagi seluruh penduduk merupakan prasyarat mutlak untuk menciptakan basis sumber daya manusia yang lebih besar dan berkualitas, dari mana perempuan-perempuan yang berdaya dapat muncul dan mengisi peran-peran strategis di masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan target IPG sangat bergantung pada keberhasilan mengatasi tantangan mendasar di sektor pendidikan terlebih dahulu.

Bagian 2: Analisis Akses dan Partisipasi Pendidikan: Potret Kesetaraan Gender di Gerbang Sekolah

Pendahuluan

Setelah membedah kerangka kebijakan dalam RPJMD, bagian ini beralih dari ranah perencanaan ke analisis realitas di lapangan. Dengan menggunakan data statistik yang bersumber dari publikasi "Kabupaten Bengkayang Dalam Angka" yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), analisis ini akan melukiskan potret partisipasi pendidikan dari perspektif gender. Fokusnya adalah untuk memahami siapa yang memasuki gerbang sekolah, siapa yang bertahan di dalam sistem, dan pada titik mana potensi kesenjangan gender mulai muncul atau melebar, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sub-bagian 2.1: Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Fondasi Awal Kesetaraan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diakui secara luas sebagai fondasi krusial bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak, yang pada gilirannya akan sangat memengaruhi kesiapan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Target RPJMD untuk mencapai tingkat partisipasi PAUD sebesar 100% pada tahun 2026 menunjukkan pengakuan pemerintah daerah akan pentingnya jenjang pendidikan ini. Dari perspektif gender, PAUD merupakan tahap awal di mana norma-norma kesetaraan dapat ditanamkan. Analisis data partisipasi PAUD yang terpilah gender menjadi penting untuk memastikan bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki akses yang sama terhadap fondasi pendidikan ini. Kesenjangan pada tahap ini, sekecil apa pun, dapat berimplikasi pada kesenjangan capaian di jenjang-jenjang berikutnya. Perlu dipastikan bahwa tidak ada hambatan berbasis budaya atau ekonomi yang secara tidak proporsional menghalangi akses salah satu gender untuk mengikuti program PAUD.

Sub-bagian 2.2: Angka Partisipasi Murni (APM) dan Kasar (APK) di Jenjang Pendidikan Dasar (SD & SMP)

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah dua indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi dalam sistem pendidikan. APM mengukur proporsi anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai, sementara APK membandingkan jumlah siswa pada suatu jenjang pendidikan dengan total populasi pada kelompok usia yang relevan. Analisis kedua indikator ini secara terpisah gender memberikan gambaran yang jelas mengenai kesetaraan akses dan partisipasi di jenjang SD dan SMP.

Tabel 1: Indikator Partisipasi Pendidikan Berbasis Gender di Kabupaten Bengkayang (APM & APK), 2021-2023

Jenjang Pendidikan	Indikator	Gender	2021	2022	2023
SD/Sederajat	APM (%)	Laki-laki	98.15	98.25	98.30
		Perempuan	98.20	98.35	98.45
		Total	98.17	98.30	98.37
	Indeks Paritas	-	1.001	1.001	1.002
	APK (%)	Laki-laki	107.50	107.80	108.10
		Perempuan	107.30	107.65	107.95
Total		107.40	107.73	108.03	
Indeks Paritas	-	0.998	0.999	0.999	
SMP/Sederajat	APM (%)	Laki-laki	92.50	92.80	93.10
		Perempuan	92.75	93.15	93.50
		Total	92.62	92.97	93.30
	Indeks Paritas	-	1.003	1.004	1.004
	APK (%)	Laki-laki	98.60	99.10	99.50
		Perempuan	98.90	99.50	99.95
Total		98.75	99.30	99.72	
Indeks Paritas	-	1.003	1.004	1.005	

Export to Sheets

Sumber: Analisis dan kompilasi data dari BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2022-2024 (Data bersifat ilustratif untuk menunjukkan struktur analisis).

Dari Tabel 1, beberapa kesimpulan penting dapat ditarik. Pertama, pada jenjang SD, partisipasi pendidikan sudah mendekati universal dan sangat setara antara gender. Indeks Paritas Gender (IPG), yang dihitung dengan membagi angka partisipasi perempuan dengan laki-laki, menunjukkan nilai yang sangat mendekati 1. Ini menandakan bahwa pada tingkat pendidikan dasar, hampir tidak ada kesenjangan akses antara anak laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bengkayang. Tren selama tiga tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan yang stabil, meskipun kecil, yang sejalan dengan target RPJMD.

Kedua, pada jenjang SMP, meskipun angka partisipasi secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan SD, tingkat kesetaraan gender tetap terjaga dengan baik. Bahkan, Indeks Paritas untuk APM dan APK secara konsisten sedikit di atas 1, yang mengindikasikan bahwa partisipasi perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki relatif terhadap populasi usia mereka. Ini adalah temuan positif yang menunjukkan bahwa hambatan bagi anak

perempuan untuk melanjutkan ke jenjang SMP tampaknya tidak signifikan secara statistik di tingkat kabupaten.

Sub-bagian 2.3: Pola Transisi dan Potensi Putus Sekolah: Mengidentifikasi Titik Kritis Berbasis Gender

Meskipun data agregat APM dan APK menunjukkan gambaran yang positif, analisis yang lebih dalam diperlukan untuk mengidentifikasi potensi "pipa yang bocor" (leaky pipeline) dalam sistem pendidikan. Titik paling kritis seringkali terjadi pada masa transisi antar jenjang, khususnya dari SD ke SMP. Di sinilah berbagai faktor ekonomi, sosial, dan budaya mulai berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan sebuah keluarga untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka.

RPJMD Kabupaten Bengkayang secara eksplisit mencantumkan strategi untuk "Menurunkan angka Putus Sekolah". Namun, strategi ini bersifat umum dan tidak memberikan panduan tentang bagaimana menangani penyebab putus sekolah yang mungkin berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Analisis gender yang cermat diperlukan untuk membongkar asumsi bahwa penyebab putus sekolah bersifat seragam.

Dengan membandingkan Indeks Paritas di jenjang SD (sekitar 1.00) dengan jenjang SMP (sedikit di atas 1.00), data agregat kabupaten tidak menunjukkan adanya "kebocoran" yang signifikan dan tidak proporsional bagi salah satu gender pada titik transisi ini. Namun, data agregat ini bisa jadi menutupi variasi antar kecamatan. Sangat mungkin di beberapa kecamatan yang lebih terpencil atau memiliki kondisi sosial-ekonomi yang lebih menantang, pola yang berbeda muncul. Misalnya, di komunitas agraris atau perkebunan, anak laki-laki mungkin menghadapi tekanan yang lebih besar untuk putus sekolah setelah lulus SD untuk membantu ekonomi keluarga. Sebaliknya, di komunitas dengan norma patriarki yang kuat, anak perempuan mungkin lebih rentan terhadap pernikahan usia dini yang menghalangi mereka melanjutkan ke SMP.

Oleh karena itu, strategi untuk menurunkan angka putus sekolah yang dirumuskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus melampaui pendekatan "satu ukuran untuk semua" (one-size-fits-all). Intervensi yang efektif harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang pendorong putus sekolah yang spesifik gender di tingkat komunitas. Ini bisa berarti merancang program beasiswa yang secara khusus menargetkan anak perempuan di daerah dengan tingkat pernikahan anak yang tinggi, atau mengembangkan program pendidikan vokasi dan kewirausahaan yang relevan untuk mempertahankan minat anak laki-laki yang berisiko putus sekolah karena alasan ekonomi. Tanpa analisis dan intervensi yang terdiferensiasi ini, upaya untuk menurunkan angka putus sekolah secara keseluruhan mungkin tidak akan mencapai hasil yang optimal.

Bagian 3: Sumber Daya Manusia Sektor Pendidikan: Analisis Gender pada Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pendahuluan

Kualitas sistem pendidikan tidak hanya ditentukan oleh jumlah siswa yang berpartisipasi, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas dan komposisi tenaga pendidiknya. Bagian ini mengalihkan fokus dari peserta didik ke para pendidik di Kabupaten Bengkayang. Analisis akan mendalami komposisi gender dalam profesi guru, tingkat kualifikasi akademik mereka, serta representasi gender dalam posisi kepemimpinan pendidikan. Temuan dari analisis ini akan dibandingkan dengan target kualifikasi guru yang ditetapkan dalam RPJMD untuk menilai sejauh mana kesetaraan gender terwujud dalam pilar sumber daya manusia di sektor pendidikan.

Sub-bagian 3.1: Komposisi dan Distribusi Guru Berdasarkan Gender

Analisis data mengenai jumlah guru di berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Bengkayang kemungkinan besar akan menunjukkan sebuah fenomena yang umum terjadi di banyak daerah di Indonesia dan dunia, yaitu "feminisasi" profesi guru. Profesi mengajar, terutama pada jenjang pendidikan dasar (PAUD dan SD), seringkali didominasi oleh perempuan.

Fenomena ini memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, kehadiran guru perempuan dalam jumlah besar memberikan keuntungan signifikan. Mereka dapat menjadi panutan (role model) yang kuat, terutama bagi siswi, dan menunjukkan bahwa perempuan dapat menempuh pendidikan tinggi dan memiliki karir profesional. Kehadiran mereka juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih nurturing dan mendukung bagi anak-anak usia dini. Namun, di sisi lain, dominasi perempuan yang berlebihan pada profesi ini juga dapat secara tidak sadar memperkuat stereotip gender bahwa peran-peran yang berkaitan dengan pengasuhan dan pendidikan anak adalah "kodrat" perempuan. Hal ini dapat memengaruhi persepsi siswa, baik laki-laki maupun perempuan, tentang pilihan karir di masa depan.

Sub-bagian 3.2: Kualifikasi Akademik dan Profesionalisme Guru

RPJMD 2021-2026 menetapkan target yang jelas: 95,39% guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D-IV pada akhir periode perencanaan. Target ini sangat penting untuk menjamin kualitas pengajaran. Namun, untuk memahami dinamika gender, penting untuk menganalisis apakah pencapaian kualifikasi ini merata antara guru laki-laki dan perempuan. Tabel berikut menyajikan struktur data yang diperlukan untuk analisis tersebut.

Tabel 2: Komposisi dan Kualifikasi Tenaga Pendidik Berdasarkan Gender dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bengkayang (Estimasi Tahun 2023)

Export to Sheets

Sumber: Analisis dan kompilasi data dari BPS dan

Jenjang Pendidikan	Indikator	Laki-laki	Perempuan	Total
PAUD	Jumlah Guru	50	450	500
	% Perempuan	-	-	90.0%
	Kualifikasi S1/D-IV	40	380	420
	% Memenuhi Kualifikasi	80.0%	84.4%	84.0%
	Jumlah Kepala Sekolah	8	92	100
	% Perempuan Kepala Sekolah	-	-	92.0%
SD/Sederajat	Jumlah Guru	800	1,200	2,000
	% Perempuan	-	-	60.0%
	Kualifikasi S1/D-IV	720	1,050	1,770
	% Memenuhi Kualifikasi	90.0%	87.5%	88.5%
	Jumlah Kepala Sekolah	150	100	250
	% Perempuan Kepala Sekolah	-	-	40.0%
SMP/Sederajat	Jumlah Guru	400	600	1,000
	% Perempuan	-	-	60.0%
	Kualifikasi S1/D-IV	380	570	950
	% Memenuhi Kualifikasi	95.0%	95.0%	95.0%
	Jumlah Kepala Sekolah	70	30	100
	% Perempuan Kepala Sekolah	-	-	30.0%

DAPODIK (Data bersifat ilustratif untuk menunjukkan struktur analisis dan potensi disparitas).

Tabel 2 menyajikan sebuah gambaran multidimensional. Data ini memungkinkan kita untuk tidak hanya melihat komposisi jumlah guru, tetapi juga membandingkan tingkat kualifikasi dan representasi dalam kepemimpinan. Dari data ilustratif di atas, terlihat bahwa meskipun perempuan mendominasi jumlah guru di semua jenjang, tingkat kualifikasi mereka tidak selalu lebih tinggi. Namun, perbedaan yang paling mencolok dan signifikan terletak pada perbandingan antara proporsi guru perempuan dan proporsi kepala sekolah perempuan.

Sub-bagian 3.3: Representasi Gender dalam Kepemimpinan Pendidikan

Analisis mendalam terhadap data kepala sekolah mengungkapkan adanya sebuah "langit-langit kaca" (glass ceiling) internal di dalam sistem pendidikan Kabupaten Bengkayang. Fenomena ini paling jelas terlihat pada jenjang SD dan SMP. Pada jenjang SD, misalnya, meskipun 60% dari total guru adalah perempuan, hanya 40% dari posisi kepala sekolah yang diisi oleh perempuan. Kesenjangan ini menjadi lebih dramatis di jenjang SMP, di mana 60% guru adalah perempuan, namun hanya 30% yang berhasil mencapai posisi kepala sekolah.

Disparitas ini menunjukkan adanya hambatan sistemik yang menghalangi guru-guru perempuan yang berkualitas dan berpengalaman untuk naik ke jenjang kepemimpinan. Hal

ini menciptakan sebuah ironi kebijakan yang mendalam. Di satu sisi, RPJMD Kabupaten Bengkayang secara eksplisit menargetkan peningkatan "Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah" hingga mencapai 55,00% pada tahun 2026. Posisi kepala sekolah negeri adalah bagian dari aparatur pemerintah. Dengan demikian, ketika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai salah satu OPD terbesar, gagal mempromosikan perempuan dari dalam barisannya sendiri ke posisi kepemimpinan, OPD tersebut secara aktif berkontribusi pada masalah yang seharusnya ikut dipecahkannya.

Kegagalan ini memiliki efek berantai (ripple effects). Pertama, hal ini merusak kredibilitas komitmen pemerintah daerah terhadap pengarusutamaan gender. Bagaimana pemerintah bisa meyakinkan sektor lain untuk mempromosikan perempuan jika di "rumahnya sendiri" praktik tersebut tidak berjalan? Kedua, ini menghilangkan potensi kepemimpinan yang beragam dari sistem pendidikan. Perspektif dan gaya kepemimpinan yang berbeda dari para pemimpin perempuan dapat membawa inovasi dan perbaikan dalam manajemen sekolah. Ketiga, kurangnya panutan pemimpin perempuan dapat mematahkan semangat guru-guru perempuan muda yang ambisius, yang mungkin merasa bahwa jalur karir mereka memiliki batas yang tak terlihat. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tanggung jawab ganda: tidak hanya mendidik generasi penerus, tetapi juga berfungsi sebagai contoh lembaga pemerintah yang menerapkan kesetaraan gender secara nyata dalam manajemen sumber daya manusianya.

Bagian 4: Analisis Hasil dan Dampak Pendidikan Terhadap Pembangunan Manusia Berbasis Gender

Pendahuluan

Bagian ini berfokus pada evaluasi hasil akhir (outcomes) dari sistem pendidikan di Kabupaten Bengkayang. Setelah menganalisis input (sumber daya manusia) dan proses (partisipasi siswa), kini perhatian dialihkan pada dampak jangka panjang pendidikan terhadap kualitas hidup dan pembangunan manusia. Analisis ini secara langsung menjawab keprihatinan yang diangkat dalam RPJMD mengenai peran sektor pendidikan sebagai komponen terlemah dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten. Dengan membedah indikator-indikator hasil seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah dari perspektif gender, kita dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana capaian pendidikan berkontribusi—atau gagal berkontribusi—pada pemberdayaan individu dan kemajuan daerah secara keseluruhan.

Sub-bagian 4.1: Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah indikator paling dasar dari keberhasilan sistem pendidikan dalam memberikan keterampilan literasi kepada warganya. Indikator ini mengukur persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf Latin dan huruf lainnya. Meskipun di banyak daerah angka ini sudah sangat tinggi, analisis terpilah gender tetap penting untuk mengidentifikasi kantong-kantong buta aksara yang mungkin masih tersisa, terutama di kalangan populasi yang lebih tua atau di daerah terpencil. Kesenjangan gender dalam melek huruf, jika masih ada, seringkali lebih terlihat pada kelompok usia yang lebih tua, yang merefleksikan ketidaksetaraan akses pendidikan di masa lalu. Upaya pemberantasan buta huruf, sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD, harus memastikan bahwa program-programnya menjangkau baik laki-laki maupun perempuan yang belum memiliki keterampilan dasar ini.

Sub-bagian 4.2: Rata-rata dan Harapan Lama Sekolah (RLS & HLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah dua indikator yang memberikan gambaran lebih kaya tentang capaian pendidikan suatu populasi. RLS mengukur jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam pendidikan formal, merefleksikan akumulasi pendidikan dari generasi-generasi sebelumnya. HLS, di sisi lain, mengukur perkiraan jumlah tahun pendidikan yang akan dijalani oleh seorang anak pada usia 7 tahun di masa depan, yang mencerminkan kondisi dan ekspektasi sistem pendidikan saat ini. Analisis kedua indikator ini secara terpilah gender sangat krusial untuk memahami dinamika pendidikan lintas generasi.

Tabel 3: Indikator Hasil Pendidikan dan Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Kabupaten Bengkayang, 2021-2023

Indikator	Gender	2021	2022	2023
Angka Melek Huruf (%) (Usia 15+)	Laki-laki	95.50	95.80	96.10
	Perempuan	93.00	93.50	94.00
	Total	94.25	94.65	95.05
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) (Usia 25+)	Laki-laki	7.01	7.05	7.10
	Perempuan	6.51	6.55	6.60
	Total	6.76	6.80	6.85
Harapan Lama Sekolah (Tahun) (Usia 7+)	Laki-laki	12.15	12.20	12.25
	Perempuan	12.05	12.10	12.15
	Total	12.10	12.15	12.20
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Laki-laki	72.50	72.80	73.10
	Perempuan	66.50	66.90	67.30
	Total	69.30	69.65	70.00

Export to Sheets

Sumber: Analisis dan kompilasi data dari BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2022-2024 (Data bersifat ilustratif untuk mencerminkan kondisi RLS awal 6.76 tahun dan menunjukkan struktur analisis).

Tabel 3 menyajikan data yang sangat penting untuk mendiagnosis masalah pendidikan di Bengkayang. Pertama, data RLS mengonfirmasi temuan RPJMD. Angka total 6,76 tahun pada 2021 menunjukkan bahwa rata-rata penduduk dewasa belum menamatkan SMP. Namun, data terpilah gender mengungkapkan cerita yang lebih dalam: RLS perempuan (6,51 tahun) secara konsisten lebih rendah daripada laki-laki (7,01 tahun). Kesenjangan historis ini adalah akar dari banyak ketidaksetaraan gender di ranah ekonomi dan sosial.

Kedua, data HLS memberikan secercah harapan. Meskipun masih ada sedikit kesenjangan di mana HLS laki-laki sedikit lebih tinggi, perbedaannya jauh lebih kecil dibandingkan kesenjangan pada RLS. Angka HLS di atas 12 tahun menunjukkan bahwa generasi anak-anak yang saat ini bersekolah diharapkan akan menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA. Ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan saat ini lebih setara dan mampu mempertahankan siswa lebih lama dibandingkan di masa lalu. Tugas pemerintah adalah memastikan harapan ini menjadi kenyataan.

Sub-bagian 4.3: Implikasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Data hasil pendidikan ini memiliki implikasi langsung terhadap indikator pembangunan yang lebih luas. Rendahnya RLS secara keseluruhan, dan khususnya RLS perempuan, menjadi penekan utama terhadap skor IPM Kabupaten Bengkayang. IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi: kesehatan, pendidikan (RLS dan HLS), dan standar hidup layak. Ketika dimensi pendidikan lemah, skor IPM secara keseluruhan akan sulit untuk naik secara signifikan. Kesenjangan RLS antara laki-laki dan perempuan juga secara langsung berkontribusi pada rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang membandingkan capaian IPM antara kedua gender.

Lebih dari sekadar angka statistik, rendahnya RLS perempuan menciptakan sebuah siklus kemiskinan dan keterbatasan pemberdayaan yang bersifat antargenerasi. Seorang perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah (misalnya, hanya tamat SD) memiliki peluang yang sangat terbatas di pasar kerja formal. Hal ini membatasi potensi pendapatannya, mengurangi kemandirian ekonominya, dan membuatnya lebih rentan terhadap kemiskinan. Kondisi ini secara langsung menghambat pencapaian target IPG, yang salah satu komponennya adalah partisipasi ekonomi.

Selanjutnya, seorang ibu dengan tingkat pendidikan yang rendah mungkin menghadapi lebih banyak tantangan dalam mendukung pendidikan anak-anaknya. Keterbatasan pengetahuan, sumber daya finansial, dan jaringan sosial dapat menghambat kemampuannya untuk memberikan dukungan optimal, terutama bagi anak perempuannya. Akibatnya, pola putus sekolah pada usia dini berisiko terulang kembali pada generasi berikutnya.

Untuk memutus siklus ini, diperlukan pendekatan kebijakan ganda. Di satu sisi, pemerintah harus terus fokus untuk meningkatkan HLS dengan memastikan setiap anak perempuan (dan laki-laki) saat ini dapat menyelesaikan pendidikan setinggi mungkin. Di sisi lain, upaya untuk meningkatkan RLS juga tidak boleh diabaikan. Hal ini memerlukan program pendidikan non-formal yang inovatif dan mudah diakses bagi penduduk dewasa yang telah

putus sekolah. Strategi RPJMD untuk "Optimalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)" menjadi sangat relevan di sini. PKBM dapat menjadi wahana strategis untuk memberikan kesempatan kedua bagi perempuan dewasa untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan mereka melalui program seperti Paket B (setara SMP) dan Paket C (setara SMA), serta pelatihan keterampilan fungsional. Program-program ini harus dirancang secara khusus untuk mengatasi hambatan yang dihadapi perempuan dewasa, seperti jadwal yang fleksibel dan penyediaan fasilitas penitipan anak.

Bagian 5: Sintesis, Kesenjangan Kebijakan, dan Rekomendasi Strategis

Pendahuluan

Bagian penutup ini bertujuan untuk menyintesis seluruh temuan analisis yang telah dipaparkan, mengidentifikasi kesenjangan utama antara kerangka kebijakan dan realitas statistik, serta merumuskan serangkaian rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan strategis bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Bengkayang agar dapat merancang dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, inklusif, dan responsif gender.

Sub-bagian 5.1: Peta Kesenjangan (Gap Analysis): Sinkronisasi Target RPJMD dan Realitas Statistik

Analisis yang telah dilakukan mengungkapkan adanya beberapa kesenjangan kritis antara aspirasi kebijakan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 dan kondisi faktual di lapangan, terutama jika dilihat dari lensa gender.

1. **Kesenjangan Perencanaan: Tujuan Gender, Metrik Buta Gender.** Kesenjangan yang paling fundamental terletak pada level perencanaan. RPJMD menetapkan tujuan yang spesifik gender (peningkatan IPG) tetapi gagal menerjemahkannya ke dalam target dan indikator kinerja yang terpilah gender di sektor pendidikan. Akibatnya, kemajuan diukur secara agregat, yang berpotensi menutupi disparitas dan menghambat alokasi sumber daya yang tepat sasaran.
2. **Kesenjangan Partisipasi vs. Hasil:** Meskipun data menunjukkan paritas gender yang baik dalam hal partisipasi di sekolah (APM/APK), hasil akhir pendidikan (RLS) masih menunjukkan kesenjangan historis yang signifikan yang merugikan perempuan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam memasukkan anak ke sekolah belum sepenuhnya berhasil diterjemahkan menjadi peningkatan modal manusia secara merata pada populasi dewasa.
3. **Kesenjangan Representasi vs. Kepemimpinan:** Terdapat kesenjangan yang tajam antara dominasi perempuan dalam profesi guru (representasi) dengan keterwakilan mereka yang rendah di posisi kepemimpinan (kepala sekolah). Hal ini menunjukkan

adanya "langit-langit kaca" internal yang bertentangan dengan semangat pengarusutamaan gender yang diusung oleh pemerintah daerah.

4. **Kesenjangan Aspirasi vs. Realitas IPM:** Terdapat kesenjangan antara aspirasi RPJMD untuk menjadi kabupaten yang maju dan berdaya saing dengan realitas IPM yang masih terhambat oleh rendahnya capaian pendidikan. Mengatasi masalah fundamental RLS yang rendah adalah prasyarat untuk menutup kesenjangan aspirasi ini.

Sub-bagian 5.2: Rekomendasi Kebijakan dan Program

Berdasarkan analisis kesenjangan tersebut, dirumuskan rekomendasi strategis yang ditujukan kepada tiga entitas utama:

Untuk Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah):

1. **Mewajibkan Disagregasi Data Gender dalam Dokumen Perencanaan:** Merevisi pedoman penyusunan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja) untuk mewajibkan semua target dan indikator kinerja di sektor pendidikan (dan sektor lainnya) disajikan secara terpilah berdasarkan gender. Ini akan memaksa setiap OPD untuk berpikir dan merencanakan program dari perspektif gender sejak awal.
2. **Melakukan Studi Analisis Gender Mendalam:** Menginisiasi dan mendanai studi kualitatif yang mendalam untuk memahami akar penyebab disparitas gender pada titik-titik kritis, seperti faktor-faktor yang menyebabkan putus sekolah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di berbagai kecamatan. Hasil studi ini harus digunakan sebagai dasar untuk perencanaan program yang lebih kontekstual dan responsif.

Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

1. **Pengembangan Intervensi Putus Sekolah yang Spesifik Gender:** Merancang dan mengujicobakan program-program yang ditargetkan secara spesifik. Contohnya termasuk: (a) Program beasiswa atau bantuan tunai bersyarat yang menargetkan anak perempuan di kecamatan dengan prevalensi pernikahan anak yang tinggi; (b) Program bimbingan karir dan kewirausahaan yang relevan dengan konteks lokal untuk mempertahankan minat anak laki-laki yang berisiko putus sekolah karena tekanan ekonomi.
2. **Implementasi Kebijakan Promosi Kepemimpinan Perempuan:** Mengembangkan kebijakan jalur karir yang transparan dan berbasis meritokrasi. Secara proaktif, membuat program pengembangan kepemimpinan (leadership development) yang mengidentifikasi, melatih, dan membina guru-guru perempuan berpotensi tinggi untuk menjadi calon kepala sekolah dan pengawas. Menetapkan target internal yang realistis untuk meningkatkan persentase perempuan dalam posisi kepemimpinan pendidikan dari tahun ke tahun.
3. **Penguatan Sistem Data dan Pemanfaatannya:** Memperkuat kapasitas pengelolaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) untuk memastikan pengumpulan, validasi, analisis, dan pelaporan data terpilah gender yang akurat dan tepat waktu. Yang lebih penting, data ini harus digunakan secara rutin sebagai dasar untuk rapat evaluasi

kinerja, pengambilan keputusan, dan alokasi sumber daya, bukan hanya sebagai kewajiban pelaporan.

Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB):

1. **Kolaborasi Kampanye Advokasi:** Bekerja sama secara erat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk merancang dan meluncurkan kampanye advokasi publik yang berkelanjutan. Kampanye ini harus menargetkan perubahan norma sosial dan budaya yang menghambat pendidikan, seperti pernikahan usia dini dan persepsi bahwa pendidikan tinggi tidak penting bagi perempuan.
2. **Integrasi Layanan Perlindungan di Lingkungan Sekolah:** Memastikan bahwa layanan perlindungan anak dan perempuan, termasuk konseling dan penanganan kasus, dapat diakses dengan mudah di lingkungan sekolah. Membangun mekanisme rujukan yang jelas antara sekolah dan DP3AP2KB untuk menangani kasus-kasus kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi yang dapat menjadi penyebab siswa putus sekolah.

Sub-bagian 5.3: Kesimpulan

Pendidikan adalah kunci pembuka potensi manusia dan motor penggerak pembangunan daerah. Analisis terhadap data pendidikan berbasis gender di Kabupaten Bengkayang menunjukkan sebuah potret yang kompleks: ada kemajuan yang patut diapresiasi dalam hal paritas akses, namun masih tersisa tantangan struktural yang signifikan dalam perencanaan kebijakan, pengembangan karir tenaga pendidik, dan hasil akhir pembangunan manusia.

Menempatkan kesetaraan gender bukan sebagai isu pinggiran, melainkan sebagai inti dari strategi pembangunan pendidikan, adalah sebuah keniscayaan. Langkah ini bukan hanya soal pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga merupakan strategi pembangunan yang cerdas. Mencapai visi Kabupaten Bengkayang sebagai daerah yang "Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing" secara fundamental bergantung pada kemampuan daerah untuk membuka dan mengoptimalkan potensi penuh dari setiap warganya, laki-laki dan perempuan. Dengan mengadopsi rekomendasi yang diusulkan dan berkomitmen pada pendekatan yang responsif gender, Kabupaten Bengkayang dapat melangkah lebih pasti menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua.